

Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kota Uneng Kabupaten Sikka

Marsi Nini Aryanti^{1*}, Yosefina Andia Dekrita², Margaretha Yulianti³

¹⁻³ Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Nipa, Indonesia

Korespondensi penulis : yhonadiyanto@gmail.com

Abstract: *This study aims to find out the role of the Regional Research and Innovation Development Planning Agency in Handling Slum Settlements in Uneng City Subdistrict, Sikka Regency. The problems faced are limited basic infrastructure such as roads, clean water and inadequate sanitation. This is because this area has experienced a significant increase in population and this has not been balanced with the development of adequate basic infrastructure. The research method used is a qualitative method and is analyzed qualitatively. The results of this research show that the role of the Regional Research and Innovation Development Planning Agency in Handling Slum Settlements in Uneng City Subdistrict is to coordinate aspects of the preparation and integration of policies, strategies, norms, standards, guidelines and criteria for the implementation of Housing and Settlement Areas (PKP), Coordinating technical aspects of defense, licensing, design and technical feasibility as well as integration of Housing and Settlement Area (PKP) facilities and infrastructure, Coordinating institutional aspects, including coordinating, formulating policies, strengthening institutional capacity, as well as building partnerships with other parties including the community in the form of empowerment and cooperation as well as developing databases and information on housing and residential areas (PKP), Coordinating and developing a monitoring and evaluation system for PKP implementation, including performance measurement and PKP standard parameters.*

Keywords: *Handling, Slum, Settlement, Uneng.*

Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kota Uneng Kabupaten Sikka. Permasalahan yang dihadapi yaitu keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan sanitasi yang belum memadai. Hal ini dikarenakan kawasan ini mengalami peningkatan populasi yang cukup signifikan dan tidak diimbangi dengan pengembangan infrastruktur dasar yang memadai. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa peran Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kota Uneng adalah Mengkoordinasi aspek – aspek penyusunan dan keterpaduan kebijakan, strategi, norma, standar, pedoman dan kriteria penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Mengkoordinasi aspek – aspek teknis pertahanan, perizinan, desain, dan kelayakan teknis serta keterpaduan sarana dan prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Mengkoordinasi terhadap aspek – aspek kelembagaan, meliputi koordinasi, penyusunan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta membangun kemitraan dengan pihak lain termasuk masyarakat dalam bentuk perberdayaan dan kerjasama serta mengembangkan basis data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman (PKP), Mengkoordinasi dan pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PKP, meliputi pengukuran kinerja dan parameter standar PKP.

Kata Kunci: Penangan, Permukiman, Kumuh, Uneng

1. PENDAHULUAN

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) adalah salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah, untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan merupakan salah satu bidang yang terdapat pada kantor Bapperida Kabupaten Sikka yang mana bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, koordinasi, dan pengendalian perencanaan di bidang infrastruktur pekerjaan umum, infrastruktur perhubungan dan permukiman dan kewilayahan meliputi urusan, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perumahan, dan kawasan permukiman, perhubungan, kecamatan dan kelurahan.

Dalam kegiatannya, bidang Infrastruktur dan Kewilayahan juga melaksanakan fungsinya yaitu, Penyusunan Perencanaan, Pengoordinasian penyusunan, Pengoordinasian Pelaksanaan, Pengoordinasian Dukungan, Asistensi Penyusunan, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan fungsi. Penanganan kawasan kumuh di Indonesia telah menjadi salah satu prioritas nasional mengingat tingginya tingkat urbanisasi dan perkembangan perkotaan yang pesat. Kawasan kumuh merupakan permasalahan yang dihadapi oleh banyak kota besar dan kecil, dimana penduduk yang tinggal di wilayah ini biasanya mengalami keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, dan transportasi.

Pemerintah pusat melalui berbagai program seperti Program Kota Tanpa Kumuh, berupaya mengurangi jumlah kawasan kumuh dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah perkotaan. Untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat pemerintah harus memperhatikan kehidupan yang layak bagi masyarakat melalui pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh secara komprehensif. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.

Permukiman yang layak adalah permukiman yang terdapat keteraturan bangunan, tidak terlalu padat, kualitas sarana prasarana yang baik, lingkungan yang baik, tersedia drainase, dan tersedia air minum yang layak. Namun, di beberapa tempat atau kawasan terdapat permukiman yang kumuh. Dari adanya kondisi permukiman yang kumuh masyarakat mempunyai ancaman terhadap kesehatan, sosial ekonomi, maupun rawan akan bencana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, menyatakan bahwa perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Menurut UU No. 1 Tahun 2011, kawasan kumuh didefinisikan sebagai wilayah yang memiliki kepadatan bangunan tinggi dan tidak memenuhi persyaratan teknis bangunan serta prasarana dasar yang memadai, sehingga berisiko bagi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh melalui program penataan dan permukiman.

Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sikka meliputi sejumlah 68 titik pada 9 Kelurahan di 3 kecamatan dengan luas total sebesar 145,66 hektar. Kelurahan yang menjadi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yaitu, Kelurahan Kabor, Kelurahan Kota Uneng, Kelurahan Madawat, Kelurahan Nangalimang, Kelurahan Wolomarang, Kelurahan Beru, Kelurahan Hewuli, Kelurahan Waioti, dan Kelurahan Wuring. Kota Uneng merupakan salah satu kawasan kumuh yang berada di Kabupaten Sikka.

Kelurahan Kota Uneng menjadi salah satu wilayah yang menghadapi permasalahan kumuh yang cukup serius karena terletak di kawasan tepi pantai. Kawasan ini mengalami peningkatan populasi yang cukup signifikan, terutama dengan banyaknya pendatang yang mencari pekerjaan di sekitar pusat kota Maumere. Lonjakan penduduk ini tidak diimbangi dengan pengembangan infrastruktur yang memadai, sehingga muncul kawasan-kawasan kumuh dengan kondisi lingkungan yang tidak sehat. Akses terhadap fasilitas dasar seperti sanitasi, air bersih, dan perbaikan lingkungan masih terbatas, yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.

Penanganan kawasan kumuh di Kelurahan Kota Uneng melibatkan berbagai pihak, baik dari pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat setempat. Program-program seperti KOTAKU yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar, seperti perbaikan jalan lingkungan, pengadaan sarana air bersih, dan pengelolaan sanitasi, menjadi salah satu solusi utama untuk mengurangi dampak negatif dari kondisi kumuh.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Objek penelitian ini adalah proses penanganan permukiman kumuh dan Kelurahan Kota Uneng sebagai lokasi penelitian.

Jenis Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara peneliti kepada narasumber dari Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka. Data Sekunder berupa dokumen – dokumen terkait perencanaan penanganan Permukiman Kumuh.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan melalui instrumen wawancara. Bentuk wawancara yang akan dilakukan berupa Model wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara secara rerstruktur dengan mengacu pada daftar pertanyaan yang telah disusun dan dianggap sesuai dengan aspek penanganan permukiman kumuh. Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan mengumpulkan data sekunder yang berasal dari instansi terkait atau pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka. Data ini mencangkup peran Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kota Uneng Kabupaten Sikka.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam waktu tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan sampai memperoleh data yang dianggap kredibel.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bapperida adalah suatu lembaga pemerintah daerah yang berada di Kabupaten Sikka. Bapperida dulunya disebut sebagai Bapelitbang atau Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Bpperida mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah, Untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintah Daerah.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) juga mengambil peran dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kota Uneng sesuai dengan tugas dan fungsi yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian perencanaan di bidang infrastruktur pekerjaan umum, infrastruktur perhubungan dan permukiman perumahan dan kawasan permukiman, perhubungan,kecamatan dan kelurahan.

Dalam menangani permukiman kumuh sesuai dengan tugas dan fungsi BAPPERIDA yang sudah dijelaskan diatas maka melalui bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) memiliki peran dalam menangani permukiman kumuh yaitu sebagai berikut : Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bapperida bertanggung jawab untuk mengkoordinasi Penanganan Permukiman Kumuh di Kota Uneng. Dalam hal ini bidang Infrastruktur dan Kewilayahan memiliki tugas untuk mengkoordinasi perencanaan dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah terkait dengan Penanganan Permukiman Kumuh Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan melakukan perumusan melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, perencanaan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubid Infrastruktur, Perhubungan dan Permukiman Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Infrastruktur dan Kewilayahan), menyatakan bahwa : Peran Bapperida terhadap Penanganan Permukiman Kumuh di Kota Uneng sebagai Pengkoordinasi terhadap perencanaan penyusunan program kerja penanganan permukiman kumuh Kota Uneng.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Sebagai Ketua Pokja Dalam Penanganan Permukiman Kumuh Kota Uneng.

Pokja atau Kelompok Kerja mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut,

1) Bidang Kebijakan dan Strategi

Mengkoordinasi aspek – aspek penyusunan dan keterpaduan kebijakan, strategi, norma, standar, pedoman dan kriteria penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

2) Bidang Teknis PKP

Mengkoordinasi aspek – aspek teknis pertanahan, perizinan, desain, dan kelayakan teknis serta keterpaduan sarana dan prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

3) Bidang Kelembagaan, Kemitraan, dan Informasi

Mengkoordinasi terhadap aspek – aspek kelembagaan, meliputi koordinasi, penyusunan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta membangun kemitraan dengan pihak lain termasuk Masyarakat dalam bentuk pemberdayaan dan kerjasama serta mengembangkan basis data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman (PKP).

4) Bidang Pemantauan dan Evaluasi

Mengkoordinasi dan pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PKP, meliputi pengukuran kinerja dan parameter standar PKP.

Kondisi Permukiman Kumuh Di Kelurahan Kota Uneng Sebelum Dilakukan Intervensi

Ada beberapa faktor yang dinilai cukup memperhatikan seperti:

a) Kepadatan Penduduk Tinggi

Banyak rumah dibangun dengan jarak yang sangat rapat sehingga mengakibatkan kepadatan penduduk yang cukup tinggi.

b) Kondisi Fisik Bangunan yang Buruk

Banyak rumah yang dibangun dengan menggunakan bahan bangunan yang tidak tahan lama, mudah rusak dan lapuk seperti bambu atau papan kayu bahkan atap dan dinding rumah sering bocor atau rusak.

c) Keterbatasan Infrastruktur

Biasanya pada permukiman kumuh kurangnya akses terhadap infrastruktur dasar, seperti jalan yang layak, sistem drainase yang baik serta pengelolaan sampah yang memadai. Hal ini bisa menyebabkan masalah banjir dan polusi terutama saat musim hujan.

d) Kualitas Air dan Sanitasi Buruk

Salah satu masalah yang serius adalah kurangnya akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak. Sebagian masyarakat juga masih menggunakan air sumur bor yang airnya bersumber dari laut yang mengakibatkan air terasa asin. Selain itu, saluran pembuangan yang tidak terorganisir dengan baik yang bisa menyebabkan masalah kesehatan.

e) Masalah kesehatan dan keamanan

Dengan kondisi lingkungan yang buruk kesehatan masyarakat sering terganggu. Banyaknya limbah, polusi, dan kurangnya fasilitas kesehatan membuat masyarakat rentan terhadap penyakit.

Intervensi yang dilakukan di permukiman kumuh biasanya bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi, serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan layak huni. Program ini sering melibatkan upaya perbaikan fisik, seperti pembenahan infrastruktur jalan, sistem drainase, serta penyediaan fasilitas umum yang lebih memadai.

Tantangan Utama Yang Dihadapi Dalam Proses Penanganan Permukiman Kumuh

Dalam proses penanganan permukiman kumuh di kelurahan kota uneng terdapat tantangan utama yang dihadapi seperti :

- a) Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya Penanganan permukiman kumuh membutuhkan investasi yang besar dalam pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan dasar (air bersih, sanitasi, drainase). Keterbatasan anggaran pemerintah atau lembaga terkait menjadi kendala utama dalam melaksanakan intervensi yang komperhensif dan berkelanjutan.
- b) Kepemilikan Tanah dan Isu Legalitas Banyak permukiman dibangun diatas lahan yang statusnya tidak jelas, seperti tanah negara, tanah milik pribadi tanpa dokumen resmi, atau tanah yang berada di kawasan yang diperuntukkan bagi hunian. Isu legalitas lahan ini sering kali mempersulit proses pembangunan infrastruktur dan relokasi warga, karena ada ketidakpastian hukum yang menghambat perencanaan dan pelaksanaan proyek.
- c) Kepadatan Penduduk yang Tinggi Permukiman kumuh biasanya sangat padat dengan penduduk, yang menjadikan upaya perbaikan lebih sulit karena keterbatasan ruang. Penataan ulang permukiman sering kali bertentangan dengan kebutuhan ruang warga yang sudah terbatas, serta ketidakmampuan mereka untuk berpindah tempat karena keterbatasan ekonomi.
- d) Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Salah satu tantangan dalam penanganan permukiman kumuh adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perubahan perilaku dan lingkungan.

Indikator Yang Digunakan Untuk Mengidentifikasi Suatu Wilayah Sebagai Permukiman Kumuh

Lingkungan perumahan, sanitasi lingkungan, dan pembuangan limbah rumah tangga, kondisi rumah (RTLH), status kepemilikan lahan, kepadatan bangunan, kondisi air bersih, MCK, pengelolaan sampah, dan drainase menjadi faktor yang menyebabkan kawasan tersebut menjadi kumuh. Sebagian masyarakat memanfaatkan air dari sumur bor yang tidak bersih sehingga berpotensi menimbulkan penyakit karena mengonsumsi air yang tidak bersih. Pembuangan limbah rumah tangga dan kondisi jaringan jalan yang tidak baik juga menyebabkan suatu kawasan menjadi kumuh.

Program Atau Kebijakan Yang Mendukung Upaya Penanganan Permukiman Kumuh

Penanganan Permukiman Kumuh Di Kota Uneng Dari Segi Karakteristik Seperti Bangunan Gedung, Jalan Lingkungan, Penyediaan Air Minum, Drainase Lingkungan, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Persampahan, Dan Proteksi Kebakaran Harus Diupayakan Agar Semuanya Terpenuhi Karena Untuk Menjadi Permukiman Yang Tidak Di Katakan Kumuh Ketika Semua Karakteristik Yang Disebut Sudah Terpenuhi Karena Merupakan Persyaratan Yang Telah Diatur. Jika Permukiman Kumuh Tidak Ditangani Maka Dampak Yang Akan Terjadi Yaitu Masyarakat Akan Semakin Miskin, Kesehatan Masyarakat Akan Semakin Menurun Berpengaruh Terhadap Pendidikan, Lingkungan Sosial, Sosial Budaya, Dan Ekonomi Masyarakat. Maka Dari Itu Perlu Adanya Peran Aktif Pemerintah, Masyarakat Dan Pihak Swasta Dalam Menangani Permukiman Kumuh Yang Ada Di Kabupaten Sikka.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Peran Bapperida Sendiri dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kota Uneng Kabupaten Sikka sebagai Ketua Pokja (Kelompok Kerja). Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa sebagai Ketua Pokja memiliki peran sebagai Pengkoordinasian dalam penyusunan dalam keterpaduan kebijakan, strategi, norma, standar, pedoman dan kriteria. Selain itu Bapperida juga menggordinasi aspek teknis pertanahan, perizinan, desain, dan kelayakan serta keterpaduan sarana dan prasarana.

Sebagai Ketua Pokja juga Bapperida menggordinasi aspek kelembagaan, meliputi mengkoordinasi penyusunan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta membangun kemitraan dengan pihak lain termasuk masyarakat dalam bentuk pemberdayaan dan kerjasama, serta menggordinasi pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bapperida mempunyai peran yang cukup penting dalam kaitannya dengan Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kota Uneng Kabupaten Sikka.

Sesuai dengan tugas dan fungsi bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah itu sendiri yaitu, penyusunan dan koordinasi program rencana pembangunan daerah. Dalam menjalankan perannya terkait penanganan permukiman kumuh itu menjadi tugas pada bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

(Infrastruktur dan Kewilayahan). Namun bidang Infrastruktur dan Kewilayahan selain menjadi koordinasi bidang ini juga melakukan monitoring.

Saran

Sesuai dengan permasalahan yang sudah disebutkan bahwa Bapperida terkhususnya pada bidang Infrastruktur dan Kewilayahan disarankan agar dapat menanggapi permukiman kumuh yang ada di Kabupaten Sikka agar permukiman kumuh yang ada sekarang tidak meningkat menjadi lebih banyak dan menjadi kawasan permukiman kumuh berat. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menangani permukiman kumuh sebagai berikut :

1. Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas Umum
 - a) Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur Dasar Menyediakan fasilitas dasar seperti jalan yang layak, jaringan air bersih, dan penerangan jalan umum. Pemerintah daerah juga harus bekerjasama dengan instansi yang terkait untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar.
 - b) Perbaikan Sistem Drainase Masih ada permukiman kumuh yang sering terendam banjir karena sistem drainase yang buruk. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan ulang dan pembangunan drainase yang efektif.
2. Pemberdayaan Masyarakat
 - a) Pelatihan Keterampilan dan Pemberdayaan Ekonomi Memberikan pelatihan bagi warga setempat mengenai keterampilan baru seperti kerajinan tangan atau usaha mikro lainnya. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan ekonomi warga dan mengurangi ketergantungan pada sektor informal yang tidak stabil.
 - b) Edukasi Tentang Kesehatan dan Lingkungan Menyediakan program edukasi yang membahas pentingnya kebersihan lingkungan dan cara menjaga kesehatan, seperti mengelola sampah, sanitasi, dan pencegahan penyakit.
3. Peningkatan Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan
 - a) Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Pemerintah perlu bekerja sama dengan sektor swasta dan LSM dalam menyediakan sumber daya untuk pembangunan permukiman yang lebih layak huni
 - b) Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Pengambilan Keputusan Masyarakat harus dilibatkan dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh agar program tersebut lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.

4. Program Relokasi dan Permukiman Terpadu
 - a) Relokasi Warga ke Permukiman Yang Lebih Layak Jika memungkinkan, lakukan relokasi bagi warga yang tinggal di area yang sangat tidak layak huni ke permukiman yang lebih aman dan nyaman, dengan tetap memberikan dukungan untuk penghidupan mereka.
 - b) Pembangunan Permukiman Terpadu Membangun permukiman yang menggabungkan rumah tinggal, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau sehingga tercipta lingkungan yang sehat dan layak huni.
5. Peningkatan Sistem Pengelolaan Sampah
 - a) Program Pengelolaan Sampah Terpadu Membuat sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien dengan melibatkan masyarakat dalam pengumpulan dan pemilahan sampah. Menyediakan tempat sampah yang memadai dan memberikan edukasi tentang pentingnya pengelolaan sampah.
 - b) Recycling dan Pengurangan Sampah Mengembangkan program daur ulang dan pengurangan sampah agar mengurangi beban lingkungan dan menciptakan peluang ekonomi baru.
6. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan
 - a) Peningkatan Layanan Kesehatan Meningkatkan akses layanan kesehatan, baik dari segi fasilitas maupun ketersediaan tenaga medis. Puskesmas dan Posyandu harus lebih mudah dijangkau oleh warga yang tinggal di permukiman kumuh.
 - b) Pendidikan dan Sekolah Membuka akses pendidikan untuk anak – anak di permukiman kumuh, serta menyediakan fasilitas pendidikan yang lebih baik dan terjangkau bagi mereka.
7. Penyuluhan Tentang Hak dan Kewajiban Warga
 - a) Sosialisasi Tentang Hak Kepemilikan Tanah dan Perumahan Masyarakat perlu diberikan pemahaman terkait hak kepemilikan tanah, sehingga mereka tidak terjebak dalam masalah hukum yang dapat menghambat upaya penataan permukiman.
 - b) Pemahaman Tentang Peraturan Lingkungan Warga di permukiman kumuh perlu diberi pemahaman mengenai peraturan lingkungan dan zonasi wilayah, agar mereka lebih sadar akan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Dengan langkah – langkah tersebut, diharapkan permasalahan permukiman kumuh di Kota Uneng dapat diatasi secara berkelanjutan dan menciptakan lingkungan yang lebih layak huni, sehat, dan aman bagi warganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfreda, A. A., & Goo, E. E. K. (2024). Analisis biaya operasional dan simpanan dalam memaksimalkan sisa hasil usaha pada KSP Kopdit Tuke Jung Nele. *AKUNTANSI* 45, 5(1), 30–43.
- Aquinaldo, T. N., Ghetta, A. P. K., & Juru, P. (2024). Analisis konsistensi perencanaan dan penganggaran serta implikasinya terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Sikka. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 3810–3814.
- Bainamus, M. D., Ernawati, & Purwandari, E. P. (2019). Fuzzy K-nearest neighbor (studi kasus: Kelurahan Kota Bengkulu). *IV*, 61–71.
- Bunga, F. M., Obon, W., & Meylano, N. H. (2024). The effect of emotional branding and experiential marketing on Chosik (chocolate Sikka) purchasing decisions in Sikka Regency. *International Journal of Research in Social Science and Humanities (IJRSS)*, 5(8), 61–75. <https://doi.org/10.47505/IJRSS>
- Bure, M. R., Wisang, I. V., & Juru, P. (2024). Kinerja pegawai ditinjau dari pengembangan karir dan motivasi kerja, studi kasus pada kantor badan perencanaan, penelitian dan pengembangan. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 6600–6606.
- Buu, A. L., Dekrita, Y. A., & Rangga, Y. D. P. (2024). Implementasi pemberian kredit usaha rakyat (KUR) pada KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat. *Jurnal Simki Economic*, 7(1), 156–167.
- Chuesta, R. N. B., Sanga, K. P., & Ghetta, A. P. (2024). Peran agency theory terkait manajemen risiko kredit dalam upaya meminimalisir kredit bermasalah pada KSP Kopdit Obor Mas Kanca Pasar Alok. *BUDGETING: Journal of Business, Management and Accounting*, 5(2), 1354–1359.
- Da Rato, E. Y., Dekrita, Y. A., & Aek, K. R. (2024). Analisis perencanaan laba dengan penerapan titik impas pada Perumda Air Wair Pu'an Kabupaten Sikka. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 25(2).
- Da Silva, Y. O., Temu, T. J., & Lamawitak, P. L. (2024). Knowledge management-based efforts to improve MSME performance (credit union intervention for MSME actors in Sikka Regency). *Dinasti International Journal of Education Management And Social Science*, 5(4), 429–434.
- Daud, A., Dj, A. A., Adianita, H., & Mado, Y. J. (2024). The influence of participative leadership style on job satisfaction with organizational citizenship behavior as a moderating variable. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(4), 2192–2200.
- Dekrita, Y. A., & Goo, E. E. K. (2024). Manajemen keuangan perusahaan teori & praktik. *Eureka Media Aksara*.
- Dekrita, Y. A., Afrianti, M., Della, M. F. C., Devance, M. R., Seka, G. F., Nunuhitu, P. C., ... & Bunga, M. A. V. (2024). Pentingnya pengetahuan dan kesadaran pajak bagi UMKM dalam rangka menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Desa

- Bangkoor, Kecamatan TaliburA. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(5), 9942–9947.
- Elni, Y., Wellem, I., & Wulandari, C. A. (2024). Analisis proses pemberian pinjaman dalam mitigasi risiko kredit sebagai solusi kredit macet pada KSP Kopdit Pintu Air. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 3579–3585.
- Febronia, V., & Goo, E. E. K. (2024). Prosedur pengajuan dan realisasi kredit pada KSP Kopdit Hiro Heling Cabang Utama. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 11(2), 67–76.
- Florantino, A., Wellem, I., & Transilvanus, V. E. (2024). Efektivitas perencanaan penanganan dalam upaya percepatan pengentasan permukiman kumuh. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 563–568.
- Florida, M. I., Rengga, A., & Luju, E. (2024). Analisis anggaran kas dalam meningkatkan likuiditas pada KSP Kopdit Pintu Air Rotat Indonesia. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 5(2), 4358–4368.
- Goo, E. E. K. (2024). Pengaruh total assets turn over terhadap return on assets pada KSP Kopdit Pintu Air. *AKUNTANSI 45*, 5(1), 86–91.
- Hadimujo, M. B. (2018). Dan perumahan rakyat Republik Indonesia tentang terhadap kualitas pola penanganan dan bentuk rekomendasi penanganan non fisik terkait dengan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. *Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia*.
- Hastuti, Y., Sanga, K. P., & Kurniawan, A. P. (2024). Implementasi sistem daperma (PT. Pandai) pembayaran klaim asuransi dalam pelunasan hutang anggota meninggal dunia pada KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat. *BUDGETING: Journal of Business, Management and Accounting*, 5(2), 1280–1290.
- Kementerian PUPR. (2018). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.08/PRT/M/2018. Peraturan Menteri PUPR. <https://pu.go.id/assets/media/722223172permenpupr-no-08-tahun-2018.pdf>
- Lorang, M. H. D., Obon, W., & Yulianti, M. (2024). Peran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Sikka. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 3682–3686.
- Mado, Y. J., Irwansyah, R., Kasnowo, K., Irdhayanti, E., & Khairunnisa, K. (2024). The influence of organizational culture on service quality with compensation as a moderate variable. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(2), 1638–1648.
- Maristela, T. N., Mitan, W., & Goo, E. E. K. (2024). Analisis strategi keunggulan bersaing usaha penjahit rumahan dengan pendekatan analisis SWOT: Studi kasus pada usaha jahit Ibu Mersi di Desa Habi. *Gemawisata: Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 20(2), 01–10.
- Noeng, A. Y., & Nuwa, C. A. W. (2024). Pengaruh quality of work life dan beban kerja terhadap kinerja karyawan KSP Kopdit Pintu Air Cabang Maumere. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 25(2).

- Nuwa, C. A. W., Luju, E., Wisang, I. V., & Fatima, T. A. (2023). Pengaruh pengelolaan dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Ilin Medo Kecamatan Waiblama. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(1), 705–713.
- Oktaviani, S. B. (2021). Hubungan perilaku masyarakat dengan kualitas permukiman kumuh Kiaracandong, Kota Bandung. *Seminar Nasional dan Diseminasi Tugas Akhir*, 983.
- Peraturan Bupati Sikka Nomor 1 Tahun 2024. Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kelurahan.
- Prilosadoso, B. H., Salampessy, M., Yahya, A. S., Afrizal, D., & Mado, Y. J. (2024). Socialization of improving the quality of public services through digital-based integrated village governance in villages. *Journal of Human and Education (JAHE)*, 4(4), 1025–1030.
- Rino, R. Y., Dekrita, Y. A., & Da Silva, Y. (2024). Peningkatan kapasitas perencanaan pada badan perencanaan dan penelitian dan pengembangan (Bapelitbang) dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sikka. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(3), 5637–5652.
- Sunggu, Y. F. E., Wellem, I., & Tonce, Y. (2024). Peran kelitbang dalam mendukung pembangunan ekonomi desa berbasis kajian di Kabupaten Sikka. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 4165–4169.
- Subu, F. K., Rengga, A., & Juru, P. (2024). Analisis rasio keuangan profitabilitas untuk menilai kinerja KSP Kopdit Pintu Air tahun 2017–2021. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 5(2), 4230–4238.
- Suci, N. W. (2022). Strategi penanganan permukiman kumuh melalui pembangunan rumah susun di Surabaya. *Jurnal Mahasiswa*, 4(4), 235–245.
- Sugo, Y. N., Kurniawan, A. P., & Muda, V. A. (2024). Peran BAPELITBANG dalam upaya peningkatan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Sikka. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 345–354.
- Titin, T., Dilliana, S. M., Tonce, Y., Tanur, E. A., & Winarti, T. (2024). Increasing village community knowledge through socialization of the waste independent village program. *Journal of Human and Education (JAHE)*, 4(2), 262–268.
- Undang-Undang No 1 Tahun 2011. (2011). Tentang perumahan dan kawasan permukiman.
- Valentino, G. R., Rengga, A., & Nuwa, C. A. W. (2024). Peran Bapelitbang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di tinjau dari retribusi parkir daerah di Kabupaten Sikka. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 4159–4164.
- Wahyu Wuryanti, F., & Suhedi, F. (2016). *Jurnal Permukiman*.
- Wela, P. R., Dekrita, Y. A., & Aek, K. R. (2024). Peran Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan (BAPELITBANG) dalam penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan di Kabupaten Sikka. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(3), 740–744.

Wiwik, H., Rena, P. E., & Bunga, M. A. (2024). Pengaruh kebijakan pengelolaan SDA berbasis kawasan terhadap perekonomian masyarakat di Sikka. *International Journal of Research in Social Science and Humanities*, 5(8), 199–208. <https://doi.org/10.47505/IJRSS>.